PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KUBU RAYA DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Enjillita Maisi¹⁾, Muhammad Anwar Rube'i²⁾, Erna Octavia³⁾

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Program Studi PPKn

Universitas PGRI Pontianak

e-mail: enjillitamaisi02@gmail.com¹⁾, rubeianwar139@gmail.com²⁾, erna8649@gmail.co.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kualitas pelaksanaan Pilkada. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kubu Raya memiliki peran strategis dalam setiap tahapan Pilkada, meliputi pemutakhiran data pemilih, masa kampanye, hingga pemungutan suara. Pengawasan dilakukan melalui strategi preventif seperti sosialisasi dan edukasi pemilih, serta strategi represif berupa penindakan pelanggaran. Efektivitas pengawasan ditunjang oleh pengembangan pengawasan partisipatif, pembentukan jaringan relawan pengawas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat, dan tantangan koordinasi antar-lembaga. Meskipun demikian, pengawasan Bawaslu berdampak positif dengan menurunnya pelanggaran masif seperti politik uang dan pelibatan ASN. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi publik untuk mendukung Pilkada yang lebih transparan, jujur, dan demokratis.

Kata Kunci : Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Pilkada 2024, Kubu Raya, Demokrasi

Abstract

This study aims to analyze the role of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) of Kubu Raya Regency in carrying out its supervisory function in the 2024 Regional Head Election (Pilkada), assess the effectiveness of the supervision conducted, and identify its impact on the quality of the election implementation. The study employs a qualitative approach with a descriptive method, using data collection techniques such as in-depth interviews, direct observations, and documentation. The findings show that Bawaslu Kubu Raya plays a strategic role in every stage of the election, including updating voter data, the campaign period, and election day. Supervision is carried out through preventive strategies such as voter education and socialization, as well as repressive strategies in the form of violation enforcement. The effectiveness of supervision is supported by the development of participatory monitoring, the establishment of networks of volunteer supervisors, and the use of information technology. The challenges faced include limited human resources, low public understanding, and inter-agency coordination issues. Nevertheless, Bawaslu's supervision has had a positive impact, with a decline in major violations such as vote-buying and civil servant (ASN) involvement. This study recommends strengthening institutional capacity and increasing public participation to support more transparent, fair, and democratic regional elections.

Keywords: Bawaslu, Election Supervision, Pilkada 2024, Kubu Raya, Democracy

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu proses penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang akan menjalankan pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pemilu, termasuk Pilkada, menjadi sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, serta menjamin adanya pemerintahan yang sah dan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada harus dilakukan secara transparan, jujur, adil, dan tanpa adanya kecurangan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi lokal. Untuk menjamin pelaksanaannya berlangsung adil dan jujur, pengawasan menjadi aspek krusial. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan mengawasi setiap tahapan Pilkada, mulai dari persiapan, kampanye, hingga pemungutan suara (Rahmatunnisa, 2021; Wibowo, 2021). Dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Kubu Raya, Bawaslu dihadapkan pada tantangan politik uang, netralitas ASN, dan penyebaran hoaks melalui media digital (Fitriani, 2020; Putri, 2022). Untuk mencapai tujuan tersebut, pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan Pilkada menjadi sangat penting, dan salah satu lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan tersebut

adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat. Sebagai lembaga pengawas independen, Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada, mulai dari persiapan, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilihan. Secara umum, peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada mencakup tiga aspek utama, yaitu pencegahan pelanggaran, pengawasan aktif, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Dalam aspek pencegahan, Bawaslu melakukan sosialisasi, edukasi pemilih, serta memberikan imbauan kepada peserta Pilkada dan penyelenggara pemilu agar menjalankan tugas sesuai aturan. Pengawasan aktif dilakukan dengan cara memantau kegiatan kampanye, distribusi logistik, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Selain itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi, serta merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran administratif, pidana, atau pelanggaran etika dalam Pilkada. Melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, Bawaslu memastikan bahwa setiap proses pemilihan berjalan sesuai prinsip demokrasi dan tidak dicerai oleh praktik-

praktik curang seperti politik uang, kampanye hitam, atau intimidasi terhadap pemilih. Dengan integritas dan profesionalisme, Bawaslu berperan penting sebagai pengawal demokrasi daerah yang menjaga kemurnian suara rakyat serta mendorong terciptanya pemimpin daerah yang lahir dari proses yang bersih dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam dalam konteks alamiah. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2018) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, sehingga peneliti dapat mendeskripsikan pengalaman individu maupun kelompok secara naratif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif dipandang tepat untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan metode (Asshiddiqie, 2019). Teori reinforcement (Skinner, 2017) digunakan untuk menganalisis strategi pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan pemilu. Teori ini relevan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan, karena hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pemilih dan peserta pemilu dapat ditingkatkan melalui penguatan (*reinforcement*) berupa sosialisasi, edukasi, serta penindakan atas pelanggaran. Dengan demikian, penerapan teori *reinforcement* mendukung analisis data kualitatif yang diperoleh melalui triangulasi. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meneliti fenomena secara alami dan menekankan pada makna dari data yang diperoleh tanpa menggunakan angka statistik. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi langsung, di mana peneliti mengamati secara langsung aktivitas pengawasan di lapangan; wawancara tatap muka untuk mendapatkan informasi mendalam dari para informan terkait; serta studi dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen resmi, arsip, dan rekaman kegiatan. Alat bantu pengumpulan data meliputi pedoman observasi berupa daftar cek yang sistematis dan panduan wawancara untuk memastikan pertanyaan yang diajukan relevan dengan fokus penelitian. Prosedur penelitian diawali dengan tahap persiapan yang

mencakup pemilihan lokasi penelitian dan pengurusan izin, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, dan diakhiri dengan pengolahan serta analisis data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang mencakup reduksi data untuk memilih informasi penting, penyajian data agar mudah dipahami, dan verifikasi untuk memastikan keabsahan data dan menarik kesimpulan yang tepat. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber data, maupun triangulasi teknik dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data guna meningkatkan keakuratan dan keandalan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori penguatan (*reinforcement theory*) sebagai landasan analisis, sebagaimana dikemukakan oleh Skinner bahwa perilaku individu dapat dibentuk, dipertahankan, maupun diubah melalui pemberian penguatan (*reinforcement*) yang tepat. Dalam konteks pengawasan pemilu, teori ini relevan karena Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawasan pasif, tetapi juga sebagai agen penguat kepatuhan terhadap regulasi pemilu. Penguatan positif dilakukan melalui pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap pengawas partisipatif

dan masyarakat yang aktif melaporkan pelanggaran, sedangkan penguatan negatif serta hukuman diwujudkan dalam bentuk teguran maupun sanksi administratif dan pidana kepada pihak yang melanggar aturan. Dengan demikian, penerapan teori penguatan memperlihatkan bagaimana strategi pengawasan Bawaslu Kubu Raya mampu mendorong kepatuhan, meningkatkan partisipasi publik, serta menekan praktik pelanggaran, sehingga teori ini menjadi pijakan konseptual yang kuat untuk memahami efektivitas peran Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya memiliki peran krusial dalam menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, Bawaslu Kubu Raya bertanggung jawab memastikan setiap proses dalam Pilkada, mulai dari tahap pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil, berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang berkeadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kubu Raya menjalankan strategi pengawasan preventif berupa sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengawasan partisipatif serta

strategi represif dengan penindakan pelanggaran melalui Gakkumdu. Strategi represif dilakukan melalui penindakan pelanggaran oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Mekanisme ini merupakan bentuk pengawasan langsung, karena setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Sulaiman, 2023; Nurhasim, 2018). Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Siwaslih dan patroli siber meningkatkan efektivitas pengawasan (Putri, 2022). Dampak positif pengawasan ditunjukkan dengan menurunnya kasus politik uang, meningkatnya kesadaran masyarakat, dan penguatan transparansi rekapitulasi suara. Menurut Hidayat (2019) dan Fatah (2017) proses rekapitulasi suara merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan secara transparan, jujur, dan akuntabel. Rekapitulasi suara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghitungan administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas hasil pemilu. Pelaksanaan rekapitulasi yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu serta meminimalisir potensi kecurangan dan manipulasi data. Dalam konteks pengawasan, Bawaslu memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap

tahapan rekapitulasi suara berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang ketat terhadap rekapitulasi suara akan memperkuat legitimasi hasil pemilu sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap praktik pelanggaran yang dapat merugikan peserta maupun pemilih. Dengan demikian, transparansi dalam rekapitulasi suara tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, melainkan juga bagian penting dari penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Pandangan bahwa masyarakat memiliki mekanisme informal dan formal untuk mengendalikan perilaku anggotanya sejalan hal itu yang menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu Kubu Raya dalam Pilkada 2024 adalah upaya pencegahan terhadap praktik politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pelanggaran kampanye seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Pengawasan ialah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Jufrizen, 2016). Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut (Brantas, 2019:54). Divisi ini mengedepankan penyuluhan hukum, penyusunan pedoman penanganan pelanggaran, dan pembinaan hukum kepada jajaran pengawas di tingkat bawah agar

pengawasan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kerangka hukum. Dengan mengintegrasikan pencegahan dan pendekatan hukum, divisi berupaya menciptakan ekosistem pemilu yang patuh hukum, meminimalisir pelanggaran sejak dini, serta membangun budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu menunjukkan komitmen kuat terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Pengawas Pilkada direkrut secara profesional, dengan proses seleksi yang ketat dan pelatihan berkelanjutan, sehingga kualitas dan kapabilitas pengawasan di lapangan semakin terjaga. Sistem evaluasi kinerja yang rutin, termasuk pelibatan pemda, DPRD, dan masyarakat, menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengawasan. Dalam praktiknya, Bawaslu berhasil menjaga netralitas dan validitas proses pemungutan suara melalui pemantauan ketat di TPS, penggunaan teknologi seperti Siwaslih, serta pemetaan daerah rawan yang ditindaklanjuti dengan strategi pengawasan ekstra. Manajemen data dilakukan dengan sistematis, walaupun masih menghadapi tantangan pada aspek keamanan dan integritas informasi. Dari sisi pendekatan, Bawaslu mengedepankan strategi preventif dengan memperkuat kapasitas pengawas, menyusun pedoman

teknis, dan menjalin koordinasi erat dengan KPU, Pemda, serta aparat penegak hukum. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan terus ditingkatkan melalui pendidikan politik, penyebaran informasi, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana pelaporan serta kampanye kesadaran pemilu. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya literasi politik, sikap apatis, dan maraknya hoaks masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Bawaslu terus berinovasi dalam pendekatannya, dengan harapan dapat membangun budaya pengawasan yang partisipatif dan menciptakan pemilu yang berkualitas serta dipercaya oleh seluruh elemen masyarakat.

Bagaimana peran Bawaslu Kubu Raya dalam melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 .

Pengawasan Pilkada yang efektif dan berintegritas, diperlukan fondasi yang kuat dari sisi kelembagaan, sumber daya, teknologi, serta partisipasi publik. Pertama, dukungan anggaran yang memadai dan disalurkan tepat waktu menjadi elemen vital untuk menjamin kelancaran operasional pengawasan di semua tingkatan. Tanpa dukungan finansial yang optimal, pelaksanaan pengawasan rentan terhambat secara teknis maupun logistik. Kedua, kualitas sumber daya manusia pengawas harus dijaga melalui proses rekrutmen yang profesional dan berbasis kompetensi. Pelatihan berkelanjutan sangat

diperlukan untuk memastikan pengawas memiliki pemahaman yang kuat terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, serta perkembangan isu-isu strategis di lapangan. Evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicators (KPI), didukung sistem penghargaan dan sanksi yang tegas dan adil, turut mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas individu maupun tim pengawasan. Ketiga, di era digital saat ini, integrasi teknologi dalam pengawasan menjadi keniscayaan. Penggunaan aplikasi mobile untuk pelaporan cepat, serta pengawasan ruang digital melalui Cyber Patrol, memungkinkan Bawaslu merespons dinamika secara real-time, termasuk terhadap potensi pelanggaran di media sosial dan platform daring lainnya. Teknologi ini memperluas jangkauan pengawasan, meningkatkan kecepatan respons, dan memperkuat mekanisme penindakan terhadap pelanggaran yang sebelumnya sulit dijangkau secara konvensional.

Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kubu Raya terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Efektivitas pengawasan juga dapat ditingkatkan melalui dua pendekatan utama. Pertama adalah pemberdayaan masyarakat, terutama melalui program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

(SKPP), yang mampu mendorong keterlibatan langsung warga dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan meningkatkan kesadaran dan literasi politik masyarakat, Bawaslu tidak hanya membentuk pengawas formal, tetapi juga menciptakan ekosistem pengawasan yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua adalah kolaborasi lintas lembaga, yang mencakup sinergi antara Bawaslu, KPU, Kominfo, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan pengawasan di ruang digital dan dalam mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Melalui koordinasi yang kuat dan berbasis data, setiap lembaga dapat menjalankan peran strategisnya secara terpadu dan saling melengkapi. Secara keseluruhan, pengawasan Pilkada yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis Bawaslu, tetapi juga oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan, dukungan teknologi, peran aktif masyarakat, serta kemitraan lintas sektor. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan pengawasan Pilkada ke depan dapat lebih responsif, partisipatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Bagaimana dampak dari pengawasan Bawaslu Kubu Raya terhadap kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Dampak Dari Pengawasan Bawaslu Kubu Raya Terhadap Kualitas Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kubu Raya selama Pilkada 2024 memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui program sosialisasi pengawasan partisipatif, Bawaslu berhasil membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga integritas proses demokrasi. Hal ini menciptakan kontrol sosial yang kuat dan mendorong masyarakat menjadi subjek aktif, bukan sekadar objek dalam proses demokrasi.

Pengawasan yang ketat juga berdampak pada terwujudnya transparansi dan kepastian hukum dalam proses rekapitulasi suara. Bawaslu Kubu Raya memastikan agar setiap tahapan rekapitulasi berjalan terbuka, akurat, dan dapat diawasi secara langsung. Mereka memantau indikator penting seperti suara sah, suara tidak sah, serta jumlah pemilih, dan memberikan ruang kepada saksi pasangan calon untuk menyampaikan sanggahan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi. Langkah ini sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Pengawasan Bawaslu juga terbukti efektif dalam menertibkan pelanggaran di lapangan, seperti dalam penertiban Alat

Peraga Kampanye (APK) saat masa tenang. Dengan melibatkan tim gabungan dari berbagai unsur, termasuk Satpol PP, TNI, Polri, dan pengawas pemilu di berbagai tingkatan, Bawaslu berhasil menertibkan ratusan APK yang melanggar aturan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten. Tindakan ini menunjukkan komitmen terhadap penegakan aturan dan netralitas ruang publik menjelang hari pemungutan suara.

Dalam aspek logistik, Bawaslu Kubu Raya juga menunjukkan perhatian serius melalui pengawasan melekat terhadap proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Tim pengawas logistik Bawaslu memastikan kualitas, jumlah, dan distribusi surat suara dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjamin kelancaran teknis dan integritas logistik pemilu. Dampak pengawasan juga terlihat dalam penguatan netralitas ASN dan pencegahan politik uang. Menjelang hari pemungutan suara, Bawaslu intensif melakukan pemantauan terhadap ASN, kepala desa, dan perangkat desa agar tidak berpihak kepada calon tertentu. Selain itu, Bawaslu secara aktif menindaklanjuti laporan dan potensi praktik politik uang yang dapat merusak nilai demokrasi.

Pengawasan Bawaslu menjadi semakin kuat melalui kolaborasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Melalui koordinasi yang intensif dengan

Panwaslu Kecamatan, Polri, dan Kejaksaan, Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas dalam menangani pelanggaran pemilu, terutama pada masa kritis seperti masa tenang, hari pencoblosan, dan rekapitulasi suara. Kolaborasi ini memperkuat kesiapan dan respons cepat terhadap potensi pelanggaran pemilu. Secara keseluruhan, pengawasan Bawaslu Kubu Raya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan Pilkada. Melalui pendekatan yang menyeluruh—baik dari sisi teknis, hukum, maupun partisipatif—pengawasan yang dilakukan mampu menciptakan proses pemilu yang lebih bersih, transparan, dan demokratis.

PENUTUP

Bawaslu Kabupaten Kubu Raya memainkan peran yang sangat strategis dalam memastikan proses penyelenggaraan Pilkada berjalan secara jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara teknis, tetapi juga berperan sebagai penjaga integritas demokrasi lokal. Seluruh proses dimulai dari perekrutan pengawas yang dilakukan secara profesional melalui tahapan seleksi yang ketat, yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas

dan kompetensi pengawas di lapangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya menerapkan sistem pengawasan yang terstruktur dan berlapis. Pengawasan dilakukan secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dilengkapi dengan dukungan teknologi seperti Siwaslih (Sistem Informasi Pengawasan Pemilu), serta pemetaan wilayah rawan pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pengawasan ekstra. Selain itu, manajemen data dilakukan dengan sistematis untuk mendukung analisis dan pelaporan yang akurat, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek keamanan dan integritas informasi yang harus terus diperbaiki. Bawaslu juga secara aktif melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi dan pengawasan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Pola koordinasi dan kolaborasi ini tidak hanya menciptakan sinergi dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengawasan. Dari sisi pendekatan, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya menempatkan strategi pencegahan sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dari upaya penyusunan pedoman teknis, pelatihan kepada jajaran pengawas, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi ini, untuk mendorong kesadaran dan partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pemilu. Media sosial dimanfaatkan sebagai

sarana penyebaran informasi, pelaporan pelanggaran, dan kampanye kesadaran pemilu. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya literasi politik masyarakat, sikap apatis terhadap pemilu, dan maraknya penyebaran hoaks atau informasi menyesatkan. Namun, tantangan tersebut justru mendorong Bawaslu Kabupaten Kubu Raya untuk terus berinovasi dalam pendekatan dan metode pengawasan. Dengan terus memperkuat jejaring pengawasan partisipatif dan membangun budaya demokrasi yang sehat, Bawaslu berkomitmen untuk menjadi lembaga yang responsif, adaptif, dan terpercaya oleh semua elemen masyarakat. Secara keseluruhan, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan sebagai kewajiban kelembagaan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas demokrasi lokal. Melalui kerja-kerja pengawasan yang sistematis, kolaboratif, dan partisipatif, Bawaslu turut berperan dalam menciptakan Pilkada yang berintegritas, serta membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu di Kabupaten Kubu Raya.

Efektivitas Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan fungsi pengawasan Pilkada menunjukkan progres yang signifikan, ditandai dengan upaya konsisten dalam memperkuat fondasi

kelembagaan, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi publik. Dukungan anggaran yang tepat waktu menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran operasional di lapangan, dan hal ini telah diupayakan melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dari sisi sumber daya manusia, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya telah menjalankan proses rekrutmen pengawas secara profesional dan berbasis kompetensi. Pelatihan berkelanjutan serta penerapan evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur telah mendorong terciptanya pengawasan yang lebih akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas pengawas, tetapi juga memperkuat kredibilitas lembaga di mata publik. Penggunaan teknologi dalam pengawasan juga menunjukkan langkah maju, dengan pemanfaatan sistem pelaporan digital, pengawasan ruang siber (cyber patrol), serta integrasi aplikasi pelaporan yang mempercepat deteksi dan respons terhadap pelanggaran. Ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan pemilu di era digital, khususnya dalam menangkal hoaks dan pengawasan media sosial. Efektivitas pengawasan di Kubu Raya juga ditunjang oleh pendekatan partisipatif melalui program seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), yang mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengawal proses demokrasi. Partisipasi

publik yang terus ditingkatkan ini mencerminkan keberhasilan Bawaslu dalam membangun ekosistem pengawasan yang inklusif, berbasis kesadaran, dan berkelanjutan. Di sisi lain, kolaborasi lintas lembaga antara Bawaslu, KPU, Kominfo, kepolisian, dan lembaga lain di tingkat kabupaten menjadi pilar penting dalam memperkuat sinergi pengawasan, terutama dalam menghadapi kompleksitas pemilu dan potensi pelanggaran yang bersifat multidimensi. Kemitraan strategis ini menjadi bukti bahwa Bawaslu Kabupaten Kubu Raya tidak bekerja sendiri, tetapi menjalin kerja sama aktif untuk memperkuat efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup kelembagaan yang kuat, SDM yang kompeten, teknologi yang adaptif, serta kemitraan yang solid, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya menunjukkan efektivitas yang semakin matang dalam menjalankan tugas pengawasan. Ke depan, efektivitas ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan, agar pengawasan Pilkada di Kubu Raya tidak hanya menjamin keteraturan prosedural, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemilu yang berintegritas, partisipatif, dan dipercaya oleh masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya selama Pilkada 2024 memberikan dampak nyata dan positif terhadap peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif—meliputi aspek teknis, hukum, dan partisipatif—Bawaslu berhasil menciptakan iklim pemilu yang lebih bersih, transparan, dan demokratis. Salah satu dampak paling signifikan adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Program pengawasan partisipatif, seperti sosialisasi dan pelibatan warga melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), mendorong terciptanya kontrol sosial yang kuat dan partisipasi aktif warga dalam menjaga integritas proses demokrasi. Dari sisi teknis, pengawasan Bawaslu Kubu Raya terbukti efektif dalam menjaga transparansi dan akurasi proses rekapitulasi suara. Pengawasan melekat terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, memastikan proses berjalan terbuka dan sesuai aturan. Selain itu, pengawasan terhadap logistik pemilu, mulai dari penyortiran hingga distribusi surat suara, menunjukkan perhatian serius terhadap aspek teknis yang krusial untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada.

Bawaslu juga memberikan kontribusi penting dalam penegakan hukum pemilu. Melalui kolaborasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Bawaslu mampu menangani pelanggaran secara cepat dan terkoordinasi, terutama pada masa krusial seperti masa tenang dan hari pencoblosan. Pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil

negara (ASN), kepala desa, serta perangkat desa juga menjadi sorotan utama, dan upaya pencegahan dilakukan secara intensif untuk mencegah keberpihakan yang dapat mencederai prinsip keadilan pemilu. Kampanye anti-politik uang yang dijalankan secara masif dan berkelanjutan turut memberikan dampak positif dalam membentuk perilaku pemilih yang lebih rasional dan berbasis visi-misi kandidat, bukan transaksi politik. Penertiban alat peraga kampanye (APK) selama masa tenang yang dilakukan secara serentak dan melibatkan tim gabungan menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga netralitas ruang publik dan menegakkan aturan secara tegas. Secara keseluruhan, pengawasan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya selama Pilkada 2024 tidak hanya mendorong terlaksananya pemilu yang tertib secara prosedural, tetapi juga menguatkan nilai-nilai demokrasi substansial. Dampaknya terasa dalam berbagai dimensi, mulai dari penurunan pelanggaran, meningkatnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, hingga tumbuhnya budaya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Hal ini menandakan bahwa peran Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam membangun demokrasi lokal yang sehat dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. (2019). Pemilihan umum Indonesia. Grajika.
- Jufrizen. (2016). Pengertian dan Manfaat Pengawasan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 45–53.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Asshiddiqie, J. (2019). Penguatan Demokrasi dan Supremasi Hukum di Indonesia. Rajawali Pers
- Fatah, E. S. (2017). Demokrasi Lokal dan Pilkada di Indonesia. Prenada Media.
- Fitriani, E. (2020). Netralitas ASN dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 200–215.
- Hidayat, R. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 9(1), 55–70.
- Nurhasim, M. (2018). Politik Uang dan Tantangan Demokrasi Elektoral di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 23(1), 45–62.
- Putri, A. K. (2022). Pemilu di Era Digital: Tantangan Pengawasan Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Politik*, 7(1), 77–91.
- Rahmatunnisa, M. (2021). Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik*, 6(2), 123–138.
- Skinner, B. F. (2017). *About Behaviorism*. Vintage.
- Sulaiman, A. (2023). Dinamika Pilkada Serentak di Indonesia: Studi Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 145–160.
- Wibowo, H. (2021). Inovasi Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 10(3), 300–315.